

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Pergeseran Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo 2015-2019

Dea Citra Pertiwi^{1*}, Wahyu Hidayat²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang No 32 dan 33 2004 untuk melaksanakan otonomi daerah sebaik mungkin. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut harus mengembangkan potensi wilayah masing-masing sebagai modal untuk pembangunan daerah. Maka daerah diharapkan memiliki dan meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi ekonomi daerah yang memiliki sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2015-2019 Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Static Location Quotient (SLQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Analisis Shift Share Klasik dan Analisis Shift Share Estaban-Marquillas (SS-EM). Dari perhitungan gabungan SLQ DLQ yang merupakan sektor basis dalam kategori unggulan adalah sektor Konstruksi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Lainnya. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif namun juga terspesialisasi adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Real Estat; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Jasa lainnya.

Kata Kunci: *Location Quotient, Static Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share Klasik, Analisis Shift Share Estaban-Marquillas.*

Abstract

The central government issued Laws No 32 and 33 2004 to carry out regional autonomy as best as possible. With regional autonomy, regions are required to develop the potential of their respective regions as capital for regional development. So the regions are expected to have and improve their abilities in managing the economic potential in their regions without waiting for assistance from the center. This study aims to see the regional economic potential that has a leading sector in increasing growth in Ponorogo Regency. This study uses GRDP data on the basis of 2010 constant prices 2015-2019, Ponorogo Regency and East Java Province. The analysis tools used are Static Location Quotient (SLQ) Analysis, Dynamic Location Quotient (DLQ), Classical Shift Share Analysis and Estaban-Marquillas (SS-EM) Shift Share Analysis. From the combined calculation of SLQ DLQ, which is the basic sector in the superior category is the Construction sector, Real Estate Sector, Education Service Sector, Other Service Sectors. Sectors that have a competitive advantage but are also specialized are the Agriculture, Forestry and Fisheries sectors; Information and Communication sector; Financial Services and Insurance sector; Real Estate sector; Government Administration, Defense and Compulsory Social Security sector; education services sector; the Health Services and Social Activities sector; other service sectors.

Keywords: *Location Quotient, Static Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share Klasik, Analisis Shift Share Estaban-Marquillas.*

Pendahuluan

Pemerintahan pusat telah mengeluarkan Undang-Undang No 32 dan 33 2004 untuk melaksanakan otonomi daerah. Sistem ini dari sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut otonomi daerah merupakan hal baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Basuki and Gayatri 2009). Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan potensi wilayah masing-masing sebagai modal untuk pembangunan daerah. Maka daerah diharapkan memiliki dan meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat, hal ini untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional (Ayubi 2012).

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu hal yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga memperlancar ekonomi (Mangilaleng, Rotinsulu, and Rompas 2015). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana menyebabkan pendapatan perkapita penduduk di suatu negara meningkat dengan jangka panjang serta perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan dari pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi disparitas pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi akan berjalan efektif serta efisien harus sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dan tepat sasaran (Statistik 2020).

Kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan kemampuan segala sumber daya nya secara lokal daerah sebab setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Arif and Soejoto 2008). Perbedaan SDM, SDA, sosial budayanya dan teknologi serta bagaimana memanfaatkannya. Jadi semua kebijakan disusun berdasarkan masalah daerah, kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah. Proses penyusunan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan nasional maupun kebijakan daerah lain yang dianggap berhasil bisa digunakan acuan.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dengan memperhatikan peranan masing-masing dalam PDRB, skala prioritas pembangunan dapat ditentukan. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dilihat dari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat lebih besar dari pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan merupakan sesuatu keadaan utama serta suatu keharusan untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan (Damanhuri and Findi 2014).

ECONOMIE

Kabupaten Ponorogo salah satu bagian dari Provinsi Jawa Timur, yang merupakan andil dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Dilihat dari sisi jumlah penduduk, berdasarkan data statistik (Ponorogo 2020) jumlah penduduk tahun 2019 mencapai 871.370 jiwa dengan mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo berada pada usia produktif.

Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun terakhir mempunyai PDRB tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Karesidenan Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo cukup memiliki kekuatan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya dan berpotensi untuk dikembangkan. Masing-masing daerah turut berkontribusi pada PDRB Jawa Timur. Jumlah PDRB di setiap daerah tidak sama, namun memiliki kualitas dan kuantitas potensinya masing-masing. Pada pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB ADHK Kabupaten/Kota dalam PDRB Jawa Timur 2019 sejumlah 15 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara 23 kabupaten/kota lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya di Kabupaten Ponorogo.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo masih sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo bukan menjadi penyumbang kontribusi terbanyak di Jawa Timur seperti Kota Surabaya. Maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi ekonomi daerah dalam peningkatan pertumbuhan.

Tinjauan Pustaka

Mengilaleng (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui sektor unggulan Kabupaten Minahasa tahun 2004-2013. Hasil yang menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian sektor konstruksi, sektor industri dan sektor yang mempunyai daya saing terbesar di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor industri. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercakup dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Minahasa tahun 2004-2013 baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku. Peneliti menggunakan teknik analisis LQ dan Shift Share.

Hajeri (2015) menunjukkan bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan gabungan analisis yaitu Tipologi Klassen, LQ dan DLQ serta Shift Share yaitu pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor lainnya yang menjadi peluang sektor unggulan yaitu sektor industri, gas dan air bersih berdasarkan analisis memiliki koefisien positif antara Tipologi Klassen dan gabungan LQ dan DLQ. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder PDRB Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

ECONOMIE

Irmansyah (2019) menjelaskan bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Mojokerto dengan kriteria ke dalam sektor basis dan kompetitif adalah sektor industri pengolahan dan untuk sektor yang harus diprioritaskan adalah sektor industri pengolahan dan real estate. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ), Analisis Dynamiq Location Quotient (DLQ) dan Analisis Shift Share. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016

Aditama (2019) mengenai penetapan sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur wilayah Utara menjelaskan menggunakan analisis Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA). Hasil penelitian dari analisis Tipologi Klassen untuk 8 kabupaten hanya ada 1 kabupaten yang termasuk dalam kategori wilayah yang cepat maju dan cepat tumbuh yaitu di Kabupaten Bojonegoro, wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah acuannya (Provinsi Jawa Timur). Dan hasil dari analisis LQ dan Shift Share menunjukkan bahwa sebagian besar sektor yang menjadi basis di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur bagian utara secara umum unggul dalam sektor perdagangan besar dan eceran, reprasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi real estate dan jasa-jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang diambil dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari setiap kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur wilayah utara di periode 2012-2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Melakukan pengamatan pada sektor-sektor ekonomi yang berada di Kabupaten Ponorogo, alasan memilih penelitian di Kabupaten Ponorogo karena dikatakan memiliki PDRB yang tinggi dan meningkat dibanding dengan Kabupaten lainnya di wilayah Karisidenan Madiun. Hal ini cukup memiliki kekuatan untuk dikembangkan. Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang memberikan keterangan mendukung sumber data primer. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2015-2019 Provinsi Jawa Timur dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2015-2019 di Kabupaten Ponorogo.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi merupakan teknik atau proses pengumpulan data dengan jalan mengutip dokumen-dokumen yang relevan yang telah

ECONOMIE

dipublikasi oleh lembaga atau instansi terkait dan studi pustaka merupakan teknik atau proses pengumpulannya dengan cara membaca atau mempelajari literatur perpustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai dokumen, artikel dan karya ilmiah untuk landasan teori sebagai dasar acuan penelitian

Teknik analisis ini menggunakan Teknik analisis Static Location Quotient (SLQ) merupakan suatu perbandingan dengan besarnya suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri secara nasional (Tarigan 2005). Analisis LQ untuk mengidentifikasi kategori suatu sektor termasuk dalam sektor unggulan ataupun non unggulan.

Rumus untuk menghitung LQ sebagai berikut :

$$\frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

Keterangan :

- V_{ik} : Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten/kota) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Rill (PDRR) daerah studi k
- V_k : PDRB total seluruh sektor di daerah studi k
- V_{ip} : Nilai output (PDRB) sektor i daerah referensi p (provinsi) dalam pembentukan PDRB daerah referensi p
- V_p : PDRB total seluruh sektor di daerah referensi p

Berdasarkan perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut :

- Nilai LQ = 1, maka sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri.
- Nilai LQ > 1, maka sektor yang bersangkutan lebih besar laju pertumbuhan dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan.
- Nilai LQ < 1, maka sektor yang bersangkutan lebih kecil laju pertumbuhan dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.

DLQ merupakan perkembangan dari SLQ. DLQ atau Dynamic Location Quatient (DLQ) adalah analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time series/trand.. DLQ adalah modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor pangsa sub sektor dari waktu ke waktu. DLQ dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

ECONOMIE

$$DLQ_{ip} = \left[\frac{(1 + g_{ip}) / (1 + g_p)}{(1 + g_{ig}) / (1 + g_g)} \right]^t = \frac{ipps_{ip}}{ipps_{ig}}$$

Dimana:

DLQ_{ip} = indeks potensi sub sektor di daerah studi

G_p = pangsa pertumbuhan PDRB sub sektor di daerah studi

GIG = Rata- rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh sub sektor di daerah studi

GG = Rata- rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh sub sektor di daerah referensi

T = selisih tahun akhir dan tahun awal

$IPPS_{ip}$ = indeks potensi pengembangan sub sektor i di daerah studi

$IPPS_{ig}$ = indeks potensi pengembangan sub sektor i di daerah referensi

Hasil nilai DLQ dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sub sektor i di daerah studi lebih cepat dibandingkan sub sektor yang sama di daerah referensi.
2. Jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sub sektor i di daerah studi lebih lambat dibandingkan daerah referensi

Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah industri tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, atau tertinggal.

Kriteria	SLQ < 1	SLQ > 1
DLQ > 1	Andalan	Unggulan
DLQ < 1	Tertinggal	Prospektif

Teknik analisis shift share yaitu membandingkan dan menganalisis perbedaan struktur ekonomi daerah dengan sektor perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan menentukan kinerja atau produktivitas kinerja perekonomian daerah dan pembandingnya dengan daerah yang lebih besar (tingkat nasional)

Mangilaleng et al (2015) mengatakan analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan
2. Pergeseran proporsional (*Proportional Shift*) mengukur relative, perubahan atau penurunan pada daerah di bandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang di jadikan pada acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah

ECONOMIE

terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

3. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saing dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Jadi suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah dan efisien akan mempunyai differential shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Analisis shift share menjelaskan jika perubahan suatu variabel regional di suatu sektor di suatu daerah dalam beberapa waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri serta keunggulan kompetitif (Ma'mun & Irwansyah, 2014).

Rumus analisis shift share dan komponennya sebagai berikut (Hajeri et al., 2015) :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Adapun persamaan rincian rumus shift share klasik sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} \times (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$$

Sehingga persamaan Shift Share Klasik untuk sektor i di wilayah Kabupaten Ponorogo j adalah

$$D_{ij} = E_{ij} \times r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$$

Shift Share Esteban Marquillas (E-M) dengan shift share klasik memiliki asumsi dasar yang sama mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif sehingga muncul unsur baru yaitu Homethic Empliment di suatu sektor suatu wilayah. Persamaan Shift Share menurut Esteben Marquillas mengandung unsur baru yang diberi notasi E'_{ij} dan didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (E_{ij}), bila struktur wilayah dengan struktur nasional atau $E_{ij} = E'_{ij}$ maka E'_{ij} (Ma'mun & Irwansyah, 2014):

$$E'_{ij} = E_j (E_{in}/E_n)$$

Apabila E_{ij} diganti dengan E'_{ij} maka persamaan $C_{ij} = E_{ij} (r_{ij}-r_{in})$ diganti dengan :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

A_{ij} sebagai pengaruh alokasi dapat dilihat dari dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor di wilayah j ($E_{ij} - E'_{ij}$) yang dikalikan dengan keunggulan kompetitif ($r_{ij} - r_{in}$).

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_{in})$$

ECONOMIE

Dari hasil modifikasi Estaban Marquillas (E-M) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Dij = Eij \times rn + Eij (rin - rn) + E'ij \times (rij - rin) + (Eij - E'ij) (rij - rin)$$

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Static Location Quotient (SLQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi pada produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai kedalam sektor basis maupun non basis dengan membandingkan sektor PDRB Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Hasil perhitungan Static Location Quotient dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SLQ Kabupaten Ponorogo

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,34	2,36	2,32	2,39	2,38	2,36	basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	non basis
3	Industri Pengolahan	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	non basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	0,30	non basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,98	0,98	1,00	1,02	1,04	1,01	basis
6	Konstruksi	0,99	1,00	1,02	1,03	1,05	1,02	basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,96	0,96	0,98	0,99	1,01	0,98	non basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,57	0,58	0,60	0,61	0,65	0,60	non basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,57	0,57	0,53	0,58	0,58	0,57	non basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,53	1,56	1,56	1,57	1,55	basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,20	1,20	1,23	1,24	1,25	1,23	basis
12	Real Estate	1,52	1,54	1,55	1,57	1,59	1,55	basis
13	Jasa Perusahaan	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,58	non basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	2,38	2,40	2,43	2,43	2,42	2,41	basis
15	Jasa Pendidikan	3,11	3,16	3,26	3,28	3,30	3,22	basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,21	basis
17	Jasa Lainnya	1,42	1,43	1,45	1,47	1,51	1,45	basis

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

Berdasarkan hasil analisis LQ/SLQ pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa ada beberapa sektor di Kabupaten Ponorogo yang termasuk sektor basis maupun non basis. Bahwa yang memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ berarti masuk kedalam sektor basis. Dari sepuluh sektor basis tersebut sektor yang paling tinggi adalah pada sektor Jasa Pendidikan yang memiliki nilai LQ terbesar dengan nilai rata-rata 3,22. Sektor ini sangat penting karena dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi regional. Pada sektor non basis yang memiliki rata-rata $LQ < 1$ yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah sektor industri pengolahan yaitu dengan nilai rata-rata 0,24.

Rata-rata nilai LQ/SLQ di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 memiliki sektor unggulan yang lebih banyak dibanding non unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sektor ekonomi yang bisa terpenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri bahkan juga dapat diekspor keluar wilayah. Hal ini diharapkan akan berimbas ke sektor non unggulan dan perlahan akan mampu berkembang dan mendorong perekonomian wilayah.

ECONOMIE

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan jika $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sektor *i* di suatu kabupaten lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Namun sebaliknya, jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sektor *i* di suatu kabupaten lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Hasil perhitungan Dynamic Location Quotient dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis DLQ Kabupaten Ponorogo

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,00	1,00	0,97	1,02	0,98	0,99	lambat
2	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,91	0,99	0,99	1,00	0,97	lambat
3	Industri Pengolahan	1,01	1,01	1,02	0,99	0,99	1,00	cepat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	1,03	1,02	1,05	1,05	1,04	cepat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,98	0,99	1,00	1,00	1,01	1,00	cepat
6	Konstruksi	1,00	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	cepat
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,02	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	cepat
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,02	1,02	1,00	1,03	1,02	cepat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1,01	0,99	0,94	1,05	0,99	0,99	lambat
10	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	cepat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	1,00	1,01	0,99	0,99	1,00	cepat
12	Real Estate	1,01	1,01	1,00	1,00	0,99	1,00	cepat
13	Jasa Perusahaan	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99	1,00	cepat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	1,00	cepat
15	Jasa Pendidikan	1,01	1,01	1,02	0,99	0,99	1,00	cepat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	lambat
17	Jasa Lainnya	0,99	1,00	1,00	0,99	1,01	1,00	cepat

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

Berdasarkan hasil analisis DLQ pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa ada beberapa yang di Kabupaten Ponorogo yang perkembangan sektor ekonomi yang cepat maupun lambat. Seperti yang tercantum pada tabel diatas yang memiliki nilai rata-rata $DLQ > 1$ yang berarti sektor unggulan. Dari 13 sektor unggulan tersebut yang memiliki nilai rata-rata terbesar yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai rata-rata 1,04. Dan semua sektor yang $DLQ < 1$ paling terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata 0,97. Dilihat rata-rata nilai DLQ Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata nilai $DLQ > 1$ yang berarti potensi perkembangan yang cepat dengan perbandingan Provinsi. Hal ini diharapkan sektor unggulan dan perlahan-lahan sektor non unggulan ini akan mampu berkembang dan dapat mendorong perekonomian wilayah.

Gabungan Analisis SLQ dan DLQ

Dari dua analisis diatas klasifikasi/kriteria sektor ekonomi berdasarkan gabungan nilai SLQ dan DLQ dijelaskan pada Tabel 3 sebagai berikut :

ECONOMIE

Tabel 3. Hasil Gabungan SLQ dan DLQ

KRITERIA	SLQ < 1	SLQ > 1
DLQ > 1	ANDALAN :	UNGGULAN :
	• Industri Pengolahan,	• Konstruksi,
	• Pengadaan Listrik dan Gas,	• Real Estate,
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,	• Jasa Pendidikan,
	• Transportasi dan Pergudangan	• Jasa Lainnya
DLQ < 1	TERTINGGAL :	PRESPEKTIF :
	• Pertambangan dan Penggalian,	• Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
	• Jasa Perusahaan	• informasi dan Komunikasi;
		• Jasa Keuangan dan Asuransi;
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;	
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

Berdasarkan gabungan hasil analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dinamic Location Quotient (DLQ) pada Tabel 3 yang termasuk dalam kategori sektor ekonomi unggulan yaitu : sektor Konstruksi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Lainnya. Artinya, sektor tersebut memiliki nilai SLQ >1 dan nilai DLQ > 1. Sektor ini sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan agar perekonomian di Kabupaten Ponorogo semakin meingkat dan produk sektor tersebut bisa diekspor ke luar wilayah.

Sektor yang termasuk kategori ekonomi andalan yaitu : Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan. Artinya, sektor tersebut memiliki nilai SLQ < 1 dan nilai DLQ > 1, sektor ini berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi, namun untuk kebutuhan di wilayah sendiri masih bisa dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo harus memberi perhatian khusus agar sektor ini memiliki potensi untuk berkembang dan tidak melakukan impor.

Sektor yang termasuk kategori sektor ekonomi prospektif yaitu, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Artinya, sektor tersebut memiliki nilai SLQ > 1 dan nilai DLQ < 1. Sektor ini bisa memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri, namun tidak berpotensi untuk dikembangkan.

ECONOMIE

Sedangkan sektor yang termasuk dalam kategori sektor ekonomi tertinggal yaitu : Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan. Yang artinya, sektor tersebut memiliki nilai $SLQ < 1$ dan nilai $DLQ < 1$, sektor ini tidak bisa memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan tidak ada potensi untuk dikembangkan lagi.

Analisis Shift Share Klasik

Teknik analisis shift share yaitu membandingkan dan menganalisis perbedaan struktur ekonomi daerah dengan sektor perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (tingkat regional atau tingkat nasional). Hasil analisis Shift Share Klasik Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 dijelaskan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Shift Share Klasik

No	LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	791,63	-693,48	6,22	104,37
2	Pertambangan dan Penggalian	66,35	9,83	-35,62	40,56
3	Industri Pengolahan	193,96	23,57	36,16	253,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,55	-2,30	2,19	2,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,69	-0,19	0,65	3,15
6	Konstruksi	251,79	35,85	63,54	351,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran	489,14	55,82	97,93	642,88
8	Transportasi dan Pergudangan	46,43	1,31	29,38	77,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81,63	39,58	1,06	122,27
10	Informasi dan Komunikasi	236,58	86,41	17,53	340,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	87,42	-17,31	13,31	83,42
12	Real Estat	73,73	-2,40	11,69	83,02
13	Jasa Perusahaan	12,35	1,50	1,51	15,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	151,06	-51,99	4,77	103,84
15	Jasa Pendidikan	231,22	6,26	57,59	295,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,96	4,63	1,52	28,10
17	Jasa lainnya	57,91	-4,51	13,53	66,93
	JUMLAH	2798,38	-507,41	322,97	2613,94

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 4 mengenai total hasil analisis shift share klasik dapat diketahui bahwa :

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (*National growth effect*) terhadap perekonomian regional Kabupaten Ponorogo menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total sebesar 2798,38 milyar. Artinya bahwa perekonomian perekonomian regional Kabupaten Ponorogo tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur
- Pergeseran *Proporsional* (Mij); sektor ekonomi dengan nilai PP positif terbesar adalah sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 86,41 milyar. Sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan cepat di Kabupaten Ponorogo dan sektor yang memiliki nilai PP

ECONOMIE

negatif terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar -693,48 milyar, sektor ini yang pertumbuhannya lambat di Kabupaten Ponorogo. Secara keseluruhan dengan total perekonomian regional di kabupaten Ponorogo tergolong lambat, hal ini dapat dilihat nilai totalnya yaitu negatif -507,41.

- c. Pergeseran *Differensial* (Cij); secara keseluruhan dengan total perekonomian regional di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai yang positif yaitu 322,97 milyar yang artinya lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Jadi suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah dan efisien akan mempunyai differential shift component yang positif. Sektor yang memiliki Cij positif terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu bernilai 97,93 milyar. Terdapat satu sektor yang nilai DS yang negatif yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai -35,62 artinya sektor ekonomi tersebut memiliki daya saing yang lemah.

Shift Share Estaban-Marquillas (SS-EM)

Shift Share Estaban Marquillas (E-M) merupakan modifikasi dari Shift Share Klasik yaitu terdapat unsur baru yaitu pengaruh alokasi. Hasil analisis Shift Share Estabab Marquillas Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 dijelaskan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Shift Share Estaban Marquillas

No	LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	C'ij	Aij	Dij
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	791,63	-693,48	2,66	3,56	104,37
2	Pertambangan dan Penggalian	66,35	9,83	-74,14	38,53	40,56
3	Industri Pengolahan	193,96	23,57	154,11	-117,95	253,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,55	-2,30	8,02	-5,83	2,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,69	-0,19	0,66	-0,01	3,15
6	Konstruksi	251,79	35,85	64,02	-0,48	351,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran	489,14	55,82	102,26	-4,33	642,88
8	Transportasi dan Pergudangan	46,43	1,31	51,73	-22,35	77,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81,63	39,58	1,85	-0,79	122,27
10	Informasi dan Komunikasi	236,58	86,41	11,47	6,06	340,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	87,42	-17,31	11,12	2,20	83,42
12	Real Estat	73,73	-2,40	7,70	4,00	83,02
13	Jasa Perusahaan	12,35	1,50	2,66	-1,15	15,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	151,06	-51,99	2,01	2,76	103,84
15	Jasa Pendidikan	231,22	6,26	18,50	39,10	295,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,96	4,63	1,27	0,25	28,10
17	Jasa lainnya	57,91	-4,51	9,51	4,01	66,93
	JUMLAH	2798,38	-507,41	375,39	-52,42	2613,94

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

ECONOMIE

Berdasarkan Tabel 5 mengenai total hasil analisis shift share Estaban Marquillas dapat diketahui bahwa :

- a. Total keseluruhan (Dij) di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 2613,94 milyar. Maka, perekonomian di wilayah Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan mengalami perkembangan. Hal ini dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), keunggulan kompetitif (C'ij) serta efek alokasi (Aij).
- b. Pertumbuhan ekonomi (Nij) pada perhitungan shift share Estaban-Marquillas di Kabupaten Ponorogo dari jumlah semua sektor bernilai positif yaitu sebesar 2798,38 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah Ponorogo baik
- c. Bauran industri pada (Mij) perhitungan shift share Estaban-Marquillas di Kabupaten Ponorogo belum mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari total nilai negatif yaitu sebesar -507,41 milyar. Ini menunjukkan bahwa kondisi spesialis daerah di daerah Kabupaten Ponorogo tergolong lambat. Sektor yang nilai negatif paling besar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh dengan lambat di Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019. Hal tersebut dilihat pada komponen Mij yang bernilai -693,48 milyar. Sedangkan sektor Mij positif terbesar adalah pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 86,41 milyar.
- d. Komponen keunggulan kompetitif (C'ij) di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai Cij positif sebesar 375,39 milyar. Artinya secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki daya saing yang tinggi . Sektor yang memiliki C'ij positif terbesar adalah sektor industri pengolahan yaitu bernilai 154,11 milyar. Sedangkan yang C'ij yang bernilai negatif hanya satu yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian yang bernilai -74,14 milyar.
- e. Pengaruh alokasi Kabupaten Ponorogo memiliki nilai negatif sebesar -52,42 milyar. Artinya secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki alokasi PDRB yang kurang baik terhadap sektor ekonomi. Sektor yang memiliki Aij negatif terbesar adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar -117,95 milyar. Sedangkan yang memiliki Aij positif terbesar adalah sektor jasa pendidikan yaitu sebesar 39,10 milyar berarti hal ini menjadi sektor yang memiliki spesialisasi dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Komponen efek alokasi merupakan bagian dari analisis shift share yang menunjukkan apakah daerah tersebut termasuk kedalam daerah terspesialisasi sehingga memperoleh keunggulan kompetitif. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari efek alokasi akan dijelaskan pada Tabel 6 sebagai berikut:

ECONOMIE

Tabel 6. Kemungkinan Efek Alokasi

No	LAPANGAN USAHA	rij-rin	Eij-E'ij	Keunggulan Kompetitif	Spesialisasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,0019	1893,93	v	v
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,1285	-299,73	x	x
3	Industri Pengolahan	0,0446	-2642,36	v	x
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2050	-28,44	v	x
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0580	-0,18	v	x
6	Konstruksi	0,0604	-7,87	v	x
7	Perdagangan Besar dan Eceran	0,0479	-90,42	v	x
8	Transportasi dan Pergudangan	0,1515	-147,54	v	x
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0031	-253,02	v	x
10	Informasi dan Komunikasi	0,0177	341,66	v	v
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0365	60,24	v	v
12	Real Estat	0,0380	105,20	v	v
13	Jasa Perusahaan	0,0293	-39,27	v	x
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0076	365,47	v	v
15	Jasa Pendidikan	0,0596	655,57	v	v
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0165	14,95	v	v
17	Jasa lainnya	0,0559	71,78	v	v

Sumber : BPS Prov. Jatim dan Kab. Ponorogo (Data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa di Kabupaten Ponorogo sektor yang memiliki keunggulan kompetitif namun juga terspesialisasi adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Real Estat; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Jasa lainnya. Sektor tersebut yang memiliki nilai keunggulan kompetitif ($rij - rin > 0$) dan spesialisasi ($Eij - E'ij > 0$).

Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi di Kabupaten Ponorogo adalah sektor Industri Pengolahan; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Perusahaan. Sedangkan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, karena di Ponorogo masih sangat kurang pada sektor ini, sara prasarana masih belum optimal dan masih secara sederhana. Dan di Kabupaten Ponorogo tidak ada yang menunjukkan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai sektor ekonomi unggulan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019 dengan alat analisis Location Quotient (LQ) atau Static Location Quotient (SLQ),

ECONOMIE

Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share Kalsik dan Shift Share Establen Marquillas (EM) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hasil analisis gabungan Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) yang termasuk dalam sektor:

- a. Ekonomi unggulan : sektor Konstruksi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Lainnya.
- b. Ekonomi andalan yaitu : Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan..
- c. Ekonomi prospektif yaitu, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- d. Ekonomi tertinggal yaitu : Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan.

Hasil analisis Shift Share Kabupaten Ponorogo 2015-2019 yang menjadi sektor kompetitif dan terspesialisasi adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Real Estat; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Jasa lainnya

2) Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan mengupayakan lebih dalam mengembangkan sektor basis (unggulan), karena hal tersebut bisa membantu mengembangkan sektor non unggulan menjadi sektor unggulan baru, jadi tidak terabaikan begitu saja dalam perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan Kabupaten Ponorogo. Strategi pembangunan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kendala yang dimiliki serta menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk lebih menggali potensi daerah.

Daftar Pustaka

- Aditama, Reza. (2019). "Pengembangan Potensi Ekonomi Dan Penetapan Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Wilayah Utara." *Media Ekonomi*, 26(2):127. doi: 10.25105/me.v26i2.5299.
- Arif, Moch, and Ady Soejoto. (2008). "Analisis Sektor Unggulan Dalam Struktur Perekonomian

Kabupaten Lamongan.” 1–16.

Ayubi, Ahmad Afan. (2012). “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 66:37–39.

Basuki, A., and U. Gayatri. (2009). “Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 10(1):34–50. doi: 10.18196/jesp.10.1.1280.

Damanhuri, Didin S., and Muhammad Findi. (2014). *Masalah Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Hajeri, Yurisinthae Erlinda, and Eva Dolorosa. (2015). “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Di Kabuapten Kubu Raya.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2):253–69.

Irmansyah, Maulana. (2019). “Analisis Sektor Unggulan Yang Ada Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1):147–53. doi: 10.33005/jdep.v2i1.86.

Mangilaleng, Ekaristi Jekna, Debby Rotinsulu, and Wensy Rompas. (2015). “Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04):193–205.

Ponorogo, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo. (2020). *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2020*. Ponorogo.

Statistik, Badan Pusat. (2020). *PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*.

Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.